

## PEMKOT OPTIMIS CAPAI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN



wartabromo.com

Pemerintah kota (Pemkot) Ambon optimis tahun depan akan dapat meraih opini<sup>i</sup> atas Laporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebabkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah<sup>ii</sup>. Untuk itu, Pemkot Ambon perlu mendapat dukungan dari semua pihak sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.

BPK merupakan salah satu lembaga pengawas keuangan yang secara rutin memberikan masukan dan saran kepada Pemkot Ambon sehingga keuangan yang ada dapat dikelola dengan baik. Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan<sup>iii</sup> Pemkot Tahun 2013 dianggap sudah cukup baik sehingga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Olehnya itu, Pemkot Ambon berharap tahun depan bisa mendapat penilaian WTP.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, mengungkapkan bahwa Pemkot sangat optimis meraih opini WTP dengan cara membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, program baru yang diperkenalkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni monitoring pembangunan dengan sistem *real time* perlu disambut dengan baik oleh pemerintah sehingga harapan untuk meraih WTP dapat tercapai pada tahun mendatang. WTP sebenarnya bukan merupakan target kita tetapi bagaimana kita mengelola keuangan daerah itu dengan baik yang semuanya mengarah kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu Kepala BPKP Maluku, Abdul Azis menambahkan, program monitoring dengan sistem *real time* baru pertama kali dikenalkan kepada seluruh pemerintah daerah dan yang pertama dikenalkan adalah Pemkot Ambon. Menurut Abdul Azis, kami berkomitmen dengan janji kami sebagai teman pengawas untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah dan membuktikan kami hadir sebagai sahabat dan teman untuk membantu pemerintah memperlancar proses pembangunan sampai ke masyarakat. Sistem ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga hal ini harus dijawab dengan pelaksanaan yang baik dalam sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik lagi kedepan.

*Sumber Berita :*

*Siwalima, 29 Oktober 2014.*

---

<sup>i</sup> **Opini** adalah pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

<sup>ii</sup> **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

<sup>iii</sup> **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].